



Panggung Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pasangkayu: Sebuah Studi Pustaka

Rahmadi U¹

¹Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP Tomakaka Tiwikrama

Jl. Moh Hatta, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu

Email: madhiusman@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the historical stages of the formation of Pasangkayu Regency through a literature review approach. The main focus of this study is to investigate the historical, social, political, and administrative dynamics underlying the region's formation as an autonomous region. This study is a library research, which mainly gathering and analyzing various relevant sources from history records, government documents, scientific journals, and archives related to the regional expansion process. The study's findings indicate that the formation of Pasangkayu Regency was inseparable from the aspirations of local communities seeking improved public services, accelerated development, and strengthened regional identity. Furthermore, geographic factors, natural resource potential, and strategic government considerations played an important role in the regional expansion process from its parent region. This process involved a lengthy process, from the discourse of expansion, administrative struggles, to official determination by the central government. The formation of Pasangkayu Regency resulted from a complex interaction between historical, social, and political factors that developed at the time. This study is expected to enrich the local historical studies for further research on the dynamics of regional expansion in Indonesia.*

Keywords: *local history, regional expansion, Pasangkayu Regency, literature study*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji panggung sejarah terbentuknya Kabupaten Pasangkayu melalui pendekatan studi pustaka. Fokus utama penelitian adalah menelusuri dinamika historis, sosial, politik, dan administratif yang melatarbelakangi pembentukan wilayah tersebut sebagai daerah otonom. Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber relevan yang mencakup catatan sejarah, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, serta arsip terkait proses pemekaran wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terbentuknya Kabupaten Pasangkayu tidak terlepas dari aspirasi masyarakat lokal yang menginginkan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta penguatan identitas daerah. Selain itu, faktor geografis, potensi sumber daya alam, dan pertimbangan strategis pemerintah turut menjadi dasar penting dalam proses pemekaran dari wilayah induknya. Proses ini melalui tahapan panjang, mulai dari wacana pemekaran, perjuangan administratif, hingga penetapan resmi oleh pemerintah pusat. Pembentukan Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor historis, sosial, dan kebijakan politik yang berkembang pada masanya. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya studi terkait sejarah lokal serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait dinamika pemekaran wilayah di Indonesia.

Kata kunci: sejarah lokal, pemekaran wilayah, Kabupaten Pasangkayu, studi pustaka

1. PENDAHULUAN

Sejarah terbentuknya suatu wilayah administratif tidak hanya mencerminkan perjalanan politik dan pemerintahan, tetapi juga merepresentasikan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang berkembang di dalamnya. Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Barat memiliki latar historis yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Proses terbentuknya kabupaten ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian panjang peristiwa yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi sosial-politik pada masanya.

Sebelum resmi menjadi kabupaten, wilayah Pasangkayu merupakan bagian dari Kabupaten Mamuju Utara. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efektif serta dorongan untuk mempercepat pembangunan daerah, muncul aspirasi untuk melakukan pemekaran wilayah. Aspirasi ini kemudian berkembang

menjadi gerakan kolektif yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai elemen lainnya. Proses tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya otonomi daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah.

Pembentukan Kabupaten Pasangkayu juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai menguat sejak era reformasi. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingannya. Dalam konteks ini, pemekaran wilayah menjadi salah satu strategi yang banyak ditempuh untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Pasangkayu menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan pada tingkat lokal.

Selain itu, studi mengenai “panggung sejarah” terbentuknya Kabupaten Pasangkayu juga membuka ruang untuk mengkaji peran aktor-aktor lokal, dinamika kekuasaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pembentukan tersebut. Istilah “panggung sejarah” dalam penelitian ini merujuk pada ruang interaksi berbagai kepentingan dan peristiwa yang membentuk realitas historis suatu daerah.

Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini berupaya untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan semisal dokumen resmi, catatan sejarah, jurnal ilmiah, serta arsip terkait. Model ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses historis pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya penelitian terkait sejarah lokal serta berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika pembentukan wilayah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Kabupaten Pasangkayu.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan secara terorganisir dan mendalam terkait proses historis terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. Teknik pengambilan data dilakukan melalui: (1) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan pandangan responden secara lebih luas. (2) Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis yang relevan. (3) Penelusuran literatur, baik melalui perpustakaan maupun database digital seperti Google Scholar, jurnal nasional, dan sumber akademik lainnya.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan topik penelitian. (2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti

latar belakang pembentukan, proses pemekaran, dan dinamika sosial-politik. (3) Interpretasi data, yaitu menafsirkan data untuk memahami kronologi dan makna historis terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. (4) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian secara sistematis dan logis.

Untuk menjamin keabsahan data, teknik Triangulasi sumber digunakan, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, kredibilitas literatur digunakan dengan memilih sumber yang valid, terpercaya, dan relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur terhadap berbagai sumber seperti buku sejarah lokal, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, dan arsip daerah, diperoleh beberapa temuan utama terkait proses terbentuknya Kabupaten Pasangkayu.

Pertama, secara historis wilayah Pasangkayu merupakan bagian dari Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (sebelumnya termasuk wilayah Sulawesi Selatan sebelum pemekaran provinsi). Wilayah ini secara umum terkenal dengan potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian.

Kedua, munculnya aspirasi pemekaran daerah tidak terlepas dari faktor geografis dan administratif. Jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju menyebabkan keterbatasan akses layanan publik, pembangunan yang tidak merata, serta rendahnya efektivitas birokrasi di wilayah utara.

Ketiga, gerakan pemekaran daerah mulai menguat pada era reformasi, seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Masyarakat lokal, tokoh adat, dan elite politik daerah secara aktif mendorong terbentuknya daerah otonom baru sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, secara administratif, Kabupaten Mamuju Utara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Kemudian, berdasarkan dinamika sosial dan kultural serta keinginan untuk mengangkat identitas lokal, nama Mamuju Utara diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting yang berkaitan dengan proses berdiri atau terbentuknya Kabupaten Pasangkayu secara historis, sebagai berikut:

a. Pasangkayu sebagai “Panggung Sejarah” Pemekaran Daerah

Istilah “panggung sejarah” dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. Wilayah ini menjadi arena interaksi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan kebijakan nasional dalam kerangka desentralisasi. Pemekaran daerah bukan hanya peristiwa administratif, tetapi juga merupakan proses historis yang sarat dengan

perjuangan kolektif masyarakat. Aspirasi pemekaran di Pasangkayu mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan mampu menjawab tantangan lokal.

b. Faktor Pendorong Terbentuknya Kabupaten Pasangkayu

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terbentuknya Kabupaten Pasangkayu. Secara geografis, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan keterlambatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Secara ekonomi, potensi sumber daya alam yang besar mendorong keinginan masyarakat untuk mengelola daerahnya secara mandiri agar hasilnya lebih optimal bagi kesejahteraan lokal. Secara sosial dan budaya, keberagaman etnis dan budaya di wilayah ini memperkuat identitas lokal yang kemudian menjadi dasar legitimasi pembentukan daerah otonom. Secara Politik dan Kebijakan Nasional, kebijakan otonomi daerah pasca-reformasi memberikan peluang besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran sebagai strategi pembangunan.

c. Transformasi Identitas: Dari Mamuju Utara ke Pasangkayu

Perubahan nama dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga merupakan bentuk afirmasi identitas lokal. Nama “Pasangkayu” memiliki nilai historis dan kultural yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Transformasi ini menunjukkan bahwa sejarah tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Identitas lokal menjadi elemen penting dalam memperkuat kohesi sosial dan kebanggaan daerah.

d. Implikasi Pemekaran terhadap Pembangunan Daerah

Pemekaran Kabupaten Pasangkayu membawa dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, antara lain: Meningkatnya akses terhadap layanan publik, Percepatan pembangunan infrastruktur, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas birokrasi yang masih berkembang, serta ketergantungan pada dana pusat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terbentuknya Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai aspek, seperti dinamika sosial, politik, budaya, serta aspirasi masyarakat lokal. Perubahan status wilayah dari bagian administratif kabupaten induk hingga menjadi daerah otonom tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan kolektif masyarakat dan tokoh-tokoh daerah yang menginginkan peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas lokal.

Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa faktor geografis, potensi sumber daya alam, serta pertumbuhan penduduk turut menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan daerah

otonom baru. Peran pemerintah pusat dan daerah juga sangat menentukan dalam proses legalisasi dan pengesahan wilayah administratif tersebut. Dengan demikian, terbentuknya Kabupaten Pasangkayu dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal yang berkembang dari waktu ke waktu.

Penelitian ini berimplikasi terhadap penelitian berikutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih empiris, seperti penelitian lapangan (*field research*), guna melengkapi data historis dengan perspektif langsung dari masyarakat dan pelaku sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu: Yogyakarta.
- Akbar, S.P. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta
- Clark, R.P. (1989). *Menguak Kekuasaan Politik di dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.
- Hasan, B.I. (1996). *Membangun Masyarakat Dinamis, Demokratis dan berkeadilan*. Ababil : Jakarta.
- Kamaluddin, R. (1992). *Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Gramedia: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. & Christine (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Mansoer Fakhri. (2002). *Tiada Transformasi tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir. Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta. Insist Press.
- Maras, B.B. (2008). *Tapak-tapak Perjuangan Berdirinya Mamuju Utara*. Annora Media: Yogyakarta
- Muslim, A. (2008). *Reformasi Birokrasi; Tinjauan Pelaksanaan Otonomi daerah*. Perca. Jakarta.
- Notosusanto, N. (1983). *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia (UI Press): Jakarta
- Nur, R. (2000). *Orang Daerah Menggugat Pusat*. PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan): Jakarta.
- Pamungkas, S.B. (2001). *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Erlangga: Jakarta.
- Putra, P. (2006). *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan gerakan Sosial di Indonesia*. Malang, PlaciD's dan Averroes Press.
- Rush, M. & Althoff, P. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Saleha, Z. (2009). Mengungkap Asal-Usul Pasangkayu Mamuju Utara; Ditemukan Nelayan Asal Kaili Sulawesi Tengah. *Fajar*, hlm. 30.
- Samuel, H.P. (2004). *Tertib Politik: Pada Masyarakat yang sedang Berubah*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sudjarwo. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Mandar Maju; Bandung.
- Syamsuddin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. DEPDIKBUD. Jakarta.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada : Jakarta. Thoha, M. (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.